

Partisipasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan

Desmayeti Arfa¹, Miswanto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang

Corresponding author: desma4@gmail.com

Received : January 2018; Accepted; February 2018 ; Published : May 2018

Abstract

Woman political participation means active involvement both individual or group in government process which has impact in life. Participation is more than a government method, it has a big goal, to unite society and to educate citizen about art of government. Democracy system has to maximize quantity and intensity of participation all society include woman, and also to expand social life which is apply the principle of democracy. The purpose of this study is to identify level of woman participation in election of village head at Kuala Sempang Village, Seri Kuala Lobam Subdistrict, Bintan Regency. This study uses qualitative approach by giving review and description about woman participation in election of village head at Kuala Sempang Village, Seri Kuala Lobam Subdistrict, Bintan Regency. The amount of population is 1,143 people, and sample is taken by accidental technique, the informant who is meet by accident while the election go on. The result of this study is level of woman participation in election of village head at Kuala Sempang Village, Seri Kuala Lobam Subdistrict, Bintan Regency is very highly. It can be looked from the increase of woman participation in the election, although most of them said that all of this participation is to support village head candidate which is trusted as public figure, such as head of neighborhood association, head of administrative unit at the next-to-lowest level in city, moreover the candidate is a person who was supported by member of Indonesian Legislative Assembly although he/ she does not have any position. In other word, the reason why woman participation is so highly because there are movement to support local elite politic.

Keywords: Participation, Woman, Politic

Abstrak

Partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan. partisipasi lebih dari sekedar metode pemerintahan, ia mempunyai tujuan yang lebih luas yakni menyatukan masyarakat sipil dan mengedukasi warga Negara tentang seni pemerintahan. Para teoritis partisipasi bertolak dari dua prinsip penuntun. System

pemerintahan demokrasi harus memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil termasuk perempuan, dan memperluas bidang kehidupan sosial yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengenal pasti bagaimana partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala desa di desa Kuala Sempang kecamatan Seri Kuala Lobam kabupaten Bintan. Kaedah dalam kajian ini mengguna pendekatan kualitatif dengan memberikan ulasan dan memberikan gambaran mengenai partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala desa di desa Kuala Sempang kecamatan Seri Kuala Lobam kabupaten Bintan. Populasi dalam kajian ini berjumlah 1,143 orang dengan jumlah sampel diambil dengan teknik triangulasi yaitu informan yang dijadikan sampel ialah informan yang secara kebetulan dijumpai pada masa pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tanggal 28 April 2016. Kajian ini mendapati bahawa, partisipasi perempuan pada pemilihan kepala desa di desa Kuala Sempang kecamatan seri Kuala Lobam kabupaten Bintan adalah sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut, walaupun sebahagian besar informan mengatakan bahawa partisipasi yang mereka lakukan cenderung untuk mengangkat dan mendukung calon kepala desa yang mereka usung disebabkan kerana calon merupakan orang yang dipercayai oleh tokoh masyarakat, seperti kepala Rukun Tetangga, kepala Rukun Warga, bahkan juga calon kepala desa terpilih merupakan orang yang didukung oleh anggota dewan perwakilan rakyat walaupun saat ini sudah tidak menjabat lagi. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan tinggi dikeranakan adanya gerakan atau dukungan dari elit politik local.

Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Politik.

PENDAHULUAN

Dalam paparannya yang terkenal tentang demokrasi di Amerika Serikat abad ke-19, de Tocqueville (1945) secara tepat mengenali adanya kecenderungan Negara untuk memusatkan kekuasaan, dan karenanya menggarisbawahi kebutuhan perkumpulan sipil maupun politik alternative untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan ini jika kebebasan hendak dipertahankan. Kemauan warga negara untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pengaturan kehidupannya sendiri adalah inti dari tumbuh suburnya masyarakat sipil. Partisipasi seperti itu merupakan ungkapan dari kewargenegaraan, dan sangat penting untuk menghasilkan budaya politik bersama.

Partisipasi politik masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Yang penting, partisipasi politik merupakan proses aktif: seseorang mungkin menjadi anggota sebuah partai politik atau kelompok penekan, namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah

partai politik atau berkontribusi dalam manajemen koperasi perumahan masyarakat, maupun tindakan konvensional, yang bisa dianggap absah, seperti menandatangani petisi atau mengikuti demonstrasi damai, atau yang illegal, seperti protes dengan kekerasan atau menolak membayar pajak.

Menurut Oslon (1971) dan Downs (1957) (dalam Keith Faulks hal. 229) mengatakan bahwa tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Individu yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum atau kelompok. Implikasi dari hal ini adalah bahwa gerakan politik akan dipimpin oleh orang yang secara pribadi mendapatkan keuntungan karena terlibat. Dengan demikian, baik kaum elit politik, partisipasi adalah rasional karena hal ini memberikan mereka kekuasaan dan prestise. Mobilisasi para partisipan lain akan bergantung pada usaha meyakinkan mereka bahwa mereka bisa memperoleh keuntungan langsung dari partisipasi tersebut, dan keuntungan ini melebihi biaya yang akan dikeluarkan. Ini berarti ada beberapa jenis partisipasi yang kemungkinan lebih menyebar luas daripada lainnya. Misalnya, individu akan lebih mudah dibujuk untuk memberikan suara dalam pemilihan umum legislative. Partisipasi politik adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih penting.

Teori partisipasi demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat sebagai perkembangan atau developmental: partisipasi lebih dari sekedar metode pemerintahan; ia mempunyai tujuan yang lebih luas yakni menyatukan masyarakat sipil dan mengedukasi warga Negara tentang seni pemerintahan. Para teoritis partisipasi bertolak dari dua prinsip penuntun. System pemerintahan demokrasi harus:

1. Memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil.
2. Memperluas bidang kehidupan social yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Barber (1984) dalam Keith Faulks hal. 230 mengatakan mayoritas individu dalam demokrasi merupakan penerima pasif keputusan elit, alih-alih warga yang secara aktif membentuk politik. Keadaan ini membahayakan kondisi Negara, karena seperti ditegaskan de Tocqueville, partisipasi merupakan prasyarat mutlak untuk kebebasan berdemokrasi. Aktivisme politik tidak hanya memberi keuntungan bagi partisipan itu sendiri, melainkan juga menjadi landasan yang lebih mantap bagi stabilitas yang diusahakan kaum elit.

Oleh karena itu, Barber menawarkan visi tentang 'demokrasi yang kuat' di mana 'politik adalah sesuatu yang dilakukan oleh – bukannya untuk – warga negara' (Barber, 1984: 132-133) dalam (Keith Faulks hal. 231). Hal ini berarti memperkuat pemerintahan lokal dan memperluas praktik demokrasi ke dalam institusi-institusi masyarakat sipil, dan juga meningkatkan peluang penggunaan

referendum nasional maupun inisiatif kebijakan yang dipelopori oleh warga Negara (Barber, 1984: 10) dalam (Keith Faulks hal. 231).

Sehubungan dengan uraian diatas, pada hari Kamis, tanggal 28 bulan April 2016 Kabupaten Bintan baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Dimana dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut, dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan sangat tinggi untuk menggunakan hak suaranya, dan disisi lain ternyata masih terdapat masyarakat yang ternyata tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, hal ini dapat dilihat dari data tabel berikut ini.

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kuala Sempang Tahun 2016

No	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Jumlah daftar pemilih tetap	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih
1	TPS 1	455	438	17
2	TPS 2	688	564	124

Sumber: Data hasil Penghitungan Suara 2016

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kuala Sempang tersebut sangat didukung oleh bagaimana peranan elit lokal dalam menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemilihan Kepala Desa itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Surbakti (1999; 75-77) kelompok elit politik local dapat digolongkan menjadi tiga tipe yaitu:

1. Elit politik yang dalam segala tindakan berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan. Elit tipe ini cenderung bersifat tertutup dalam arti menolak golongan bukan elit memasuki lingkungan elit. Diantara sesama elit tipe ini terdapat kolaborasi untuk mempertahankan keadaan yang ada. Oleh karena itu, pelapisan politik tidak hanya berbentuk pyramid dan hirarki, tetapi juga tidak tanggap atas aspirasi dan tuntutan masyarakat. Elit ini disebut konservatif. Maksudnya adalah sikap dan prilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang secara jelas menguntungkannya.
2. Elit politik Liberal; yaitu sikap dan prilaku yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga Negara masyarakat untuk meningkatkan status sosial. Elit ini cenderung bersifat terbuka terhadap golongan masyarakat yang bukan elit untuk menjadi bagian dari lingkungan elit, sepanjang yang bersangkutan mampu bersaing secara sehat untuk menjadi elit, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang elit. Adanya kesempatan yang sama dan persaingan yang sehat untuk menjadi elit

cenderung membuat pelapisan masyarakat ini bersifat pluralis. Elit politik ini cenderung berorientasi pada kepentingan masyarakat umum sehingga mereka juga akan bersikap tanggap atas tuntutan masyarakat.

3. Pelawan elit (counter elite). Menurut tipe ketiga ini, para pemimpin yang berorientasi pada khalayak dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (established order) maupun dengan cara menentang segala bentuk perubahan. Ciri-ciri kelompok ini, yakni ekstrim, tidak toleran, anti intelektualisme, beridentitas superioritas rasial tertentu, dan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi dasar yang mendasari demokrasi (dan partisipasi politik) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.

Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta berpartisipasi dalam aktivitas politik itu sendiri, yang dimaksud dengan partisipasi politik disini ialah keikutsertaan warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Dari uraian diatas maka dalam kajian ini menarik untuk diteliti mengenai "Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Kepada Desa di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan".

KONSEP TEORI

Partisipasi

Secara sederhana Partisipasi dapat dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin dan secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Partisipasi politik merupakan tindakan sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum.

Herbert Miclosky (dalam Setiadi, 2013;129) mengemukakan bahwa partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Norman H. Nie dan Sidney Verba (dalam Setiadi, 2013; 129) mengemukakan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang loyal, sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang bertujuan

mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif, misalnya memberikan suara dalam pemilu legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilukada, dan kepala desa. Partisipasi di Negara-negara yang menerapkan system politik demokrasi merupakan hak warga Negara tetapi dalam kenyataan persentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara dengan Negara lain.

Dengan kata lain tidak semua warga Negara ikut serta dalam proses tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan antara lain adalah dapat dilihat dari Gejala tinggi rendahnya partisipasi itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilihat dalam dua kerangka teori (pendekatan politik) yaitu:

1. Pendekatan Kontekstual (lingkungan sosio-ekonomi dan politik). Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukannya dalam proses produksi (kelasnya), dan oleh struktur politik yang ada. Dengan kata lain, bagi pendekatan ini individu aktor politik cenderung tidak otonom atau cenderung ditentukan, bukan menentukan. Pendekatan ini acap kali disebut pendekatan disposisional atau non-intensional, termasuk di dalamnya teori belajar (learning theory) dan teori kepribadian. Untuk menjelaskan lebih lanjut dapat dilihat dari pertama, lingkungan sosial seperti system sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kedua, faktor kepribadian yang meliputi bawaan (heredity), kebutuhan dan dorongan (need and motive), kepercayaan (belief), dan sikap (attitudes). Dalam pendekatan ini lingkungan social tidak mempengaruhi perilaku politik secara langsung, melainkan berpengaruh melalui faktor kepribadian sebagai faktor perantara.
2. Pendekatan intensional (individual-psikologis). Pendekatan ini dapat dibagi dua yaitu:
 - a. Pandangan terhadap perilaku politik sebagai kegiatan tidak intensional (tak sadar tujuan) atau melihat perilaku politik sebagai hasil faktor psikologis yang mempengaruhi aktor politik pada peringkat bawah sadar; dan
 - b. Melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional).

Selain itu, partisipasi perempuan sangat mempengaruhi tinggi rendahnya hasil pemungutan suara. Menurut Surbakti (1999; 144) mengatakan bahwa faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi perempuan antara lain:

“kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (system politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik tempat tinggalnya. Yang dimaksud sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak”.

Kemudian selain itu, Jeffry M. Paige (dalam Setiadi, 2013;154) mengatakan bahwa ada empat tipe dalam partisipasi yaitu:

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasinya cenderung aktif.
- b. Sebaliknya apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasinya cenderung pasif-tertekan (apatis).
- c. Militan Radikal yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.
- d. Akhirnya, apabila seseorang mempunyai kesadaran politik yang rendah, tetapi mempunyai sikap dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka partisipasi yang demikian disebut pasif.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam suatu masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Rush dan Althof (2001; 167) bahwa karakteristik sosial seseorang seperti status sosial ekonominya, kelompok ras/etnis, usia, seks, dan agamanya, baik ia hidup di daerah atau di kota, maupun ia termasuk dalam organisasi sukarela tertentu dan sebagainya semua mempengaruhi partisipasi.

Maka dari itu, tinggi rendahnya partisipasi perempuan dalam pemilihan kepada desa di desa Kuala Sempang tidak terlepas dari bagaimana peranan yang dijalankan oleh elit lokal dalam daerah tersebut. Karena elit lokal sebagai unsur pimpinan dan panutan masyarakat turut serta dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala Desa di Desa Kuala Sempang. Dimana elit politik lokal, pada dasarnya mempunyai peranan yang tidak hanya terbatas pada masalah memperoleh kekuasaan dan membuat kebijakan serta menjalankan kebijakan yang dibuat saja, akan tetapi juga menyangkut pembinaan partisipasi perempuan dalam Pemilihan kepala desa di Desa Kuala Sempang. Hal ini berarti bahwa elit politik lokal yang merupakan ujung tombak terhadap berjalannya perilaku politik masyarakat, dimana elit politik lokal setidaknya harus mempunyai pengetahuan, kemampuan dan wawasan yang luas terhadap potensi-potensi yang ada di tubuh struktur politik yang ada pada elit lokal tersebut. Konsep-konsep yang diuraikan diatas menggambarkan bahwa elit politik lokal sangat mutlak diperlukan dalam membangun partisipasi perempuan di desa Kuala Sempang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, Dimana penulis akan menyajikan analisa mengenai partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala desa di desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan dengan cara memberikan gambaran dari partisipasi perempuan itu sendiri. Adapun yang dijadikan populasi adalah masyarakat yang terdaftar mempunyai hak suara untuk memilih (Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang terbagi dalam dua lokasi Pemungutan Suara (TPS). Tempat pemungutan Suara 1, berjumlah 455 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Tempat Pemungutan Suara 2, berjumlah 688 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling teknik penentuan sampel berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang ditetapkan dalam kajian ini adalah memilih perempuan yang menggunakan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa di desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Camat Sri Kuala Lobam

Camat merupakan jabatan yang diemban oleh seseorang untuk suatu wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Bintan. Dimana camat Seri Kuala Lobam dijabat oleh seorang perempuan berinisial EM usia 45 tahun. Yang telah menjabat selama 3,5 tahun, yang bermula pada tahun 2013. Pada masa pemilihan kepala desa di desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam berlangsung, ibu camat turut hadir menyaksikan secara langsung pemilihan tersebut. Dan beliau terkesan dengan tingginya partisipasi masyarakat desa Kuala Sempang dalam menyuarakan aspirasinya, dimana terbukti di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT) berjumlah seramai 1,143 orang. Yang menggunakan hak suaranya sebanyak 1.002 orang, sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya atau yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa Kuala Sempang tersebut terdata seramai 141 orang dan jumlah surat suara yang dinyatakan rusak hanya 0 suara.

Kandidat Kepala Desa Kuala Sempang.

Kandidat kepala desa di Desa Kuala Sempang sebanyak 4 orang yang terdiri dari:

1. Muhammad Hatta
2. Syawal Indra
3. Sunarto
4. Agus Tananang

Masing-masing kandidat merupakan warga tempatan, yang mana keempat calon kepala desa di desa Kuala Sempang ini masing-masing telah mempunyai pengalaman dan kedekatan dengan masyarakat Kuala Sempang, baik secara personal mahupun secara emosional.

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 455 orang. Yang menggunakan hak suaranya terdata seramai 438 orang, sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya atau yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa Kuala Sempang tersebut terdata seramai 17 orang dan jumlah surat suara yang dinyatakan rusak hanya 4 suara.

Surat suara yang dinyatakan rusak disebabkan kerana cara mencoblos masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku diantaranya, mencoblos tidak tepat pada gambar calon kepala desa yang akan dipilih, membuat lubang coblosan yang terlalu besar pada gambar calon kepala desa sehingga gambar calon kepala desa yang lainnya turut terkoyak, dan tidak mencoblos salah satu gambar calon kepala desa kuala sempang yang telah dimuat didalam surat suara.

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

Tempat Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT) lebih sebanyak jika dibandingkan dengan tempat pemungutan suara 1, di tempat pemungutan suara 2 jumlah daftar pemilih tetapnya berjumlah 688 orang. Yang menggunakan hak suaranya terdata sebanyak 546 orang, sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya atau yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa Kuala Sempang tersebut terdata seramai 124 orang dan jumlah surat suara yang dinyatakan rusak hanya 7 suara.

Surat suara yang dinyatakan rusak disebabkan kerana cara mencoblos masyarakat yang ikut berpartisipasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku diantaranya, mencoblos tidak tepat pada gambar calon kepala desa yang akan dipilih, membuat lubang coblosan yang terlalu besar pada gambar calon kepala desa sehingga gambar calon kepala desa yang lainnya turut terkoyak.

Di tempat pemungutan suara 2, didapatkan masyarakat yang tidak turut berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya memilih kepala desa di desa Kuala Sempang disebabkan kerana mayoritas masyarakatnya secara de jure terdata di desa Kuala Sempang, tetapi secara de facto mereka tidak berdomisili di desa Kuala Sempang disebabkan kerana tempat bekerja, dan tempat tinggal yang sudah berpindah ke tempat lain, sama ada di Bandar maupun di luar

bandar. Sehingga pada hari pemilihan kepala desa mayoritas mereka tidak sedang berada di desa Kuala Sempang.

3. Hasil Pemilihan Suara

Berdasarkan hasil penghitungan suara, hasil pemilihan yang telah dilalui selama 6 jam yang bermula dari jam 07.00 pagi hingga 13.00 siang. Diperoleh hasil coblosan suara dari masyarakat pemilih yang berpartisipasi dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2. Kandidat Kepala Desa di Desa Kuala Sempang Kecamatan
Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan**

No	Nama Kandidat	TPS 1	TPS 2	Keterangan
1	Muhammad Hatta	261	295	358
2	Syawal Indra	136	140	276
3	Sunarto	22	30	52
4	Agus Tananang	16	122	138
5	Suara Rusak	4	7	11
6	Yang tidak berpartisipasi (Golput)	17	124	141
Jumlah		455	688	1,143

Sumber: Data Hasil Pemungutan Suara 28 April 2016.

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahawa suara terbanyak diperolehi oleh Muhammad Hatta dengan perolehan suara seramai 358 suara, diikuti oleh nomor urut dua iaitu kandidat Syawal Indra dengan perolehan suara seramai 276 suara, kemudian peringkat ketiga ditempati oleh kandidat nomor urut 4 yaitu Agus Tananang dengan perolehan suara seramai 138 suara dan peringkat akhir yaitu peringkat keempat ditempati oleh kandidat nomor urut tiga dengan jumlah perolehan suara seramai 52 suara.

4. Kepala Desa Terpilih

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat diuraikan bahawa kepala desa terpilih yang memenangkan suara terbanyak pada pemilihan kepala desa di desa Kuala Sempang kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan, dimenangkan oleh kandidat nomor urut pertama iaitu Muhammad Hatta dengan perolehan suara terbanyak iaitu seramai 358 suara, mengalahkan tiga orang kandidat lainnya yang hanya memperoleh suara 276, 138 dan 52 suara. Maka dengan itu, secara definitive Muhammad Hatta terpilih sebagai kepala desa terpilih didesa Kuala Sempang kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulannya bahawa partisipasi perempuan pada pemilihan kepala desa di Desa Kuala Sempang kecamatan Seri Kuala Lobam dapat dikategorikan tinggi, hal ini dapat dilihat

dari tingginya angka pemilih perempuan yang turut serta berpartisipasi pada pemilihan tersebut atau dengan kata lain tingginya angka keikutsertaan perempuan untuk menggunakan hak suaranya sebagai daftar pemilih tetap yang terdata di desa Kuala Sempang.

Adapun jumlah perempuan yang turut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di desa Kuala Sempang ini, sebahagian besar diantaranya mengatakan bahwa mereka antusias untuk terlibat lebih disebabkan kerana adanya perasaan ingin mendukung kandidat yang menurut mereka banyak memberikan kontribusi terhadap desa Kuala Sempang, terutamanya dalam hal memberikan akses agar desa Kuala Sempang lebih bisa mengarah kearah kemajuan yang lebih baik kedepannya.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadinya kapitalisasi pada sumber mata air, telah mendorong terjadinya perubahan pola relasi sosial antar masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya menunjukkan sikap *altruistic* seperti rela berkorban, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial tinggi untuk merawat semua hal yang berhubungan dengan sumber mata air, menunjukkan sikap transaksional ketika sumber mata air telah dikapitalisasi.
2. Model pemanfaatan bersama/*common property* di desa Cikahuripan, sejauh ini masih terjaga, karena secara sosial masyarakat yang berada di sekitar sumber mata air tersebut masih memiliki hubungan kerabatan, hal ini menjadi penguat karena hampir setiap warga masyarakat yang ada di sekitar sumber mata air tersebut mengetahui tentang status lahan tempat sumber mata air tersebut berada.

Berkembangnya pemukiman baru berupa kompleks perumahan menjadi ancaman bagi model pemanfaatan bersama/*common property*, karena perumahan-perumahan baru tersebut, mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan beberapa kelompok individu dalam masyarakat pemanfaat sumber mata air melihat kesulitan tersebut sebagai peluang bagi mereka untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Agar model *common property* ini tetap terjaga maka yang perlu dilakukan adalah menjaga

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
- Ali, Hasyimi A. 2002. Organisasi dan Manajemen. Jakarta. Bumi Aksara.
- Alfian. 1996. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta. PT. Gramedia
- Jalaluddin Rakhmat. 2000. Rekayasa Sosial. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Jakarta. LP3ES.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Nashir, Haedar. 2000. Perilaku Politik Muhammadiyah. Yogyakarta. Tarawang.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sarwoto. 1980. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Setiadi, Elly M, dkk. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. Kencana Prenamedia Group.
- Siagian, Sondang P. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta. Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudita, Indiro G. 2000. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan. Yogyakarta. BPFE.
- Sudradjat, Adjat. 2007. Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Pengembangan Masyarakat. Bandung. Tiga Grafika Design.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfa Beta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT. Grasindo.
- Tayibnaxis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta. Rieneka Cipta.
- Pamudji. 1992. Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta. Media Pressindo.